
FARDHU KIFAYAH

(Sebuah Analisa Pemikiran Hukum Prof. K.H. Ali Yafie)

Anwar Sadat

UIN Alauddin Makassar
anwarsadat21@yahoo.co.id

Abstract: *This article describes the problem Fardhu kifayah: An Analysis of Legal Thought Prof. K.H. Ali Yafie in which try to explain the concept of Fardhu kifayah once again placing it a more proportional. In this study the authors also try to provide a more solid description set out in the discussion with an intellectual biography of a charismatic cleric in South Sulawesi. The method used in this study pure library approach is to read various scientific works, especially leaders KH Ali Yafie. The results showed fardhu kifaya concept is a concept that is very rational in growing social concern for> people with fixed based on what the writer is term prudence in religion.*

Kata kunci: Fardhu Kifayah, Pemikiran, dan Hukum

I. PENDAHULUAN

Pada dasarnya penerapan hukum Islam di Indonesia telah dilaksanakan oleh umat Islam baik secara individu maupun masyarakat. Hal itu dilakukan atas kesadaran akan kewajiban setiap umat Islam untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Namun demikian apa yang telah dilakukan belum sepenuhnya yang telah dikendaki ajaran Islam yaitu mengamalkan ajaran Islam secara menyeluruh dan konsisten. Hal ini sangat diperlukan adanya peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatur pelaksanaan hukum Islam sebagai bagian dari hukum nasional.

Berkaitan dengan banyak hal, era modern saat ini telah mengantarkan fiqh (hukum Islam) pada posisi problematis dan dilematis. Fiqh bukan hanya kesulitan menuntaskan berbagai masalah dan isu sosial yang dihadapi tapi juga masih gagap mendefinisikan kediriannya,

terutama dalam konteks merumuskan metode hukum yang *viable* dipergunakan menuntaskan berbagai masalah tersebut. Dalam pandangan Coulson, problem inilah yang merupakan di antara sebab terjadinya “konflik dan ketegangan” antara teori dan praktek dalam sejarah penelitian dan penerapan hukum Islam.¹ Di sisi lain, problem akut ini pula yang sekarang ini telah menstimulasi berbagai upaya pembaruan dalam bidang ini.

Dalam perspektif umum setidaknya ada tiga level yang mesti dilakukan dalam upaya merekonstruksi fiqh. *Pertama*, level pembaruan metodologis yaitu perlunya interpretasi terhadap teks-teks fiqh klasik secara kontekstual, bukan teks mati; bermazhab secara metodologis (*manhaj*); dan verifikasi ajaran yang pokok (*usul*) dan cabang (*furu'*). Dalam level ini setidaknya dapat ditempuh dua upaya yaitu dekonstruksi (*al-qat'iyah al-ma'rifiyah*) dan rekonstruksi (*al-tawasul al-ma'rifi*). *Kedua*, pembaruan level etis yaitu perlunya menghindari upaya forma-

lisasi dan legalisasi fiqih, dan lebih meneguhkannya sebagai etika sosial. *Ketiga*, pembaruan level filosofis yaitu mengantarkan fiqih sebagai yang selalu terbuka terhadap filsafat ilmu pengetahuan dan teori-teori sosial kontemporer. Kohesivitas dalam ketiga level inilah idealitas pembaruan hukum Islam diharapkan menuai kontinum keberhasilan.

Berbagai ahli hukum Islam telah secara lantang mendengungkan hasil-hasil pemikirannya secara silih berganti menyemarakkan wacana pemikiran Islam baik dari luar maupun dalam negeri, namun dalam disertasi ini, penulis bermaksud menjabarkan (mendeskripsikan) hasil-hasil pemikiran tentang hukum Islam dari salah seorang tokoh pembaru di Indonesia yang sangat populer dengan gagasan fundamentalnya Fikih sosial, yaitu Prof. K. H. Ali Yafie (selanjutnya disebut Ali Yafie).

Ali Yafie adalah sosok ulama cendekiawan kharismatik yang memiliki kemampuan untuk melakukan *tajdid*, (di bidangnya) dalam rangka mengubah pola pikir, pola memahami dan pola interpretasi nash-nash hukum/ayat yang terdapat dalam al-Qur'an dan menumbuhkan kembali semangat *ijtihad*.

Salah satu tema kajian menarik yang tertuang dalam karya besar beliau yang fundamental "Menggagas Fiqh Sosial" adalah persoalan Fardhu Kifayah. Tema ini kembali penulis angkat sebagai fokus kajian makalah kali ini mengingat masih banyak di kalangan masyarakat kita khususnya di Sulawesi Selatan yang terkadang mengesampingkan, mengabaikan (tidak peduli) dengan persoalan ini.

Untuk itu dengan bertitik tolak pada sebuah permasalahan mendasar "Bagamanakah pandangan Ali Yafie terhadap Fardhu Kifayah?", maka Penulis akan mencoba mengurai lebih jauh latar belakang kehidupan Ali Yafie berikut paparan analisis beliau terhadap permasalahan di atas.

II. PEMBAHASAN

A. Petikan Sekilas Biografi Intelektual K.H. Ali Yafie

Kajian-kajian tentang kyai, menunjukkan bahwa seorang kyai merupakan kelompok elit dari masyarakatnya, baik dari segi pemahaman keagamaan, ilmu agama ataupun dari segi sosial-ekonominya.² Seperti kebanyakan kyai (*Anre Gurutta*) di Sulawesi yang tinggal di pedesaan, mereka merupakan bagian dari kelompok elit dalam struktur sosial, politik dan ekonomi masyarakat Sulawesi khususnya Sulawesi Selatan. Sebab sebagai suatu kelompok, para kyai memiliki pengaruh yang amat kuat di masyarakat dan kebanyakan mereka memiliki kedudukan tinggi dan dipuja di masyarakat.³

Demikian juga Ali Yafie dalam fokus tulisan ini, termasuk dalam perspektif di atas. Ia berasal dari elit sosial-ekonomi. dan politik atau berasal dari keluarga kyai, memiliki pendidikan Pesantren yang cukup dan cucu dari Syekh Abdul Hafidz Bugis, satu dari tiga ulama terkemuka Indonesia yang menjadi guru besar pertama di Mesjid al Haram, Mekah-Arab Saudi.⁴

Juga berasal dari keluarga elit-ekonomi. Karena sang kakek adalah seorang ulama yang mempunyai bakat dagang. Di sela-sela kesibukannya menjadi guru besar di Mekah, dia masih sempat berdagang. Maka tak mengherankan kalau harta yang diwariskannya amatlah banyak, berupa kolam ikan, sawah dan tanah tegalan serta sebuah pulau Kalukuang yang dipenuhi ribuan pohon kelapa. Dari harta warisan itulah keluarga Muhammad Yafie (ayah Ali Yafie) hidup berkecukupan.⁵

Ali Yafie lahir, 1 September 1926, dari pasangan Muhammad Yafie dan Maccaya, di sebuah desa pantai bernama Wani Donggala, Sulawesi Tengah, barangkali tempat itu yang turut

mengalirkan sifat pribadinya yang berkemauan keras, tekun dan pantang menyerah. Adapun nama Ali Yafie disandarkan kepada ayahnya, karena nama sebenarnya adalah Muhammad Ali (selanjutnya disebut Ali Yafie).⁶

Beruntunglah KH. Ali Yafie, kakeknya tidak hanya meninggalkan nama yang besar yang bisa dibanggakan, akan tetapi juga mewariskan cukup banyak kitab, terutamanya kitab tentang hukum dan Fikih. Sebahagian kitab tersebut berbahasa Arab sisanya berbahasa Melayu. Lahir sebagai anak kelima dari sembilan bersaudara. KH Ali Yafie melewati masa mudanya di sekolah formal di *Vervolg School*, sebuah sekolah dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial Belanda bagi rakyat pribumi (*Inlader*) di Pare-Pare, Sulawesi Selatan. Namun, sejak berumur 5 tahun, KH. Ali Yafie kecil sudah mulai belajar membaca kitab kuning (kitab pelajaran agama berharuf Arab yang biasanya diajarkan di pesantren) langsung dari ayahnya, Muhammad Yafie. Untuk memperdalam ilmu fikih yang sudah mulai dipelajarinya dari ayahnya. KH Ali Yafie kemudian berguru kepada sejumlah kiai yang terkenal di Sulawesi, di antaranya kepada Ali Mathar, paman Prof. DR. Quraish Shihab setelah sempat menjadi pengajar madrasah pada tahun 1947 KH. Ali Yafie aktif di Darul Dakwa Wal Irsyad (DDI), Pare-pare, sebuah lembaga yang dipelopori oleh Syekh Abdurrahman Firdaus. Pada tahun 1963-1966. KH Ali Yafie menjadi ketua umum organisasi ini. Sejak tahun 1951 KH. Ali Yafie sempat juga tercatat menjadi pegawai Departemen Agama setempat. Kiprah KH. Ali Yafie terus memuncak hingga memegang jabatan penting di PBNU.⁷

B. Pandangan K.H. Ali Yafie tentang Fardhu Kifayah

Dantara perbuatan fardhu ada yang tergolong *fardhu 'ayn* (kewajiban individu)

dan ada yang *fardhu kifayah* (kewajiban kolektif). Sementara *fardhu 'ayn* tidak akan dibahas di sini, *fardhu kifayah* adalah kewajiban yang dikenakan pada kelompok (kewajiban kolektif) dengan ketentuan bahwa apabila ada diantara anggota kelompok yang melaksanakannya, seluruh kelompok terbebas dari sanksi. Sebaliknya, apabila tidak ada anggota kelompok yang melaksanakannya, seluruh kelompok terkena sanksi.

Penjelasan mengenai berbagai ketentuan hukum Islam, porsi yang menyangkut *fardhu kifayah* sedikit sekali. Penjelasan yang paling sering adalah dengan menyebut kewajiban mengurus jenazah, tanpa penjelasan lebih lanjut. Sudah barang tentu hal ini sangat tidak memuaskan. Sejumlah pertanyaan muncul. Misalnya, satuan apakah yang bisa disebut sebagai "kelompok" yang terkena taklif : keluarga, sanak famili, marga, rukun tetangga, rukun warga, desa (luas) wilayah, jumlah orang, atau apa? Lebih jauh, siapakah yang seharusnya bertanggung jawab untuk mengambil inisiatif, mensponsori atau mengorganisasikan (menunjuk orang, mengatur dll) pelaksanaannya?

Dalam hal mengurus jenazah, misalnya, mungkin salah satu jawabnya bisa "orang terdekat"; tetapi apa kriteria untuk itu, sehingga orang tersebut paling terkena taklif? Apakah jarak tempat tinggal (tetangga dekat), pergaulan sehari-hari, hubungan fungsional (sejawat), hubungan darah/famili atau lainnya? Lalu sesudah ada salah seorang anggota kelompok yang melaksanakan taklif, apakah yang mengerjakan itu saja yang mendapatkan pahala, sedang anggota kelompok lain hanya "terbebas" dari dosa, ataukah "kecipratan" pahala? Kalau ya, samakah pahala orang yang mengerjakan dengan yang hanya melihat saja? Kalau tidak berpahala, mengapa disebut fardhu? Dan seterusnya.

Dalam hubungan inilah maka fenomena *fardhu kifayah* penting digaris-bawahi, dan dari sisi ini pula Menggagas Fiqih Sosial karya Ali Yafie mempunyai arti penting. Walaupun hal-hal yang dipertanyakan di atas belum ter jelaskan, dari karya itu pandangan segar tentang sebuah persoalan inti setidaknya telah terlontar. Dinyatakan, misalnya, bahwa masalah *fardhu kifayah* (hingga saat ini) kurang mendapat pengkajian dan perhatian sehingga hal itu dihayati secara wajar dan diterapkan dengan benar⁸, dan pada umumnya masyarakat mendefinisikan *fardhu kifayah*, sebagai suatu kewajiban keagamaan yang jika sudah dilaksanakan oleh sebagian orang, maka sebagian yang lain sudah terbebas dari dosa, tetapi kalau tidak ada satu pun yang melaksanakannya, maka semua berdosa. Lalu diberikan contoh, umpamanya shalat jenazah. Menurut Ali Yafie definisi tersebut memang tidak salah, tetapi maknanya sangat pasif ` bahkan cenderung negatif. Karena itu Ali Yafie memperkenalkan pendapat Imam Rafi'i (seorang tokoh fuqaha syafi'iyah) yang memberikan makna yang aktif dan gambaran yang positif sekali dan pada dasarnya merupakan substansi dari *fardhu kifayah*.⁹ Yang dimaksud dengan pendapat Imam Rafi'i adalah seperti yang dinukil oleh Imam Suyuthi dalam kitab *Al-Asybah wa al-Nadhair* halaman 349, yang dalam formulasi (terjemahan) Ali Yafie berbunyi sebagai berikut; "*Fardhu kifayah* merupakan kewajiban menyangkut hal-hal umum yang berkaitan dengan kemashlahatan baik yang bersifat keagamaan (keakhiratan) maupun yang bersifat keduniaan yang pelaksanaannya menjamin tegaknya kehidupan bersama, seperti upaya mengatasi kemelaratan masyarakat. Dengan memenuhi kebutuhan sandang pangan yang tak tertanggulangi dengan zakat dan dana *bayt al-mal*; penyediaan lapangan kerja... pemeliharaan kesehatan dan kebersihan;

pengawasan umum dan kontrol sosial sehingga terwujud jaminan keamanan atas diri dan harta benda; pengajaran, pendidikan, penyuluhan dan bimbingan masyarakat dan upaya-upaya lain untuk mencerdaskan bangsa."¹⁰

Jadi bagi Ali Yafie *ri'ayah* (kepemimpinan) dan *mas'uliyah* (tanggungjawab) yang menyangkut kehidupan bermasyarakat merupakan inti dari apa yang disebut *fardhu kifayah* yang telah disinggung di atas. Karena itu *fardhu kifayah* yang biasanya digambarkan sangat sempit pengertiannya, harus disempurnakan untuk mencapai suatu definisi yang komprehensif sebagaimana diungkapkan oleh Imam Safi' i di atas.¹¹

Kalau demikian, inti ajaran *fardhu kifayah* sebenarnya menyangkut aspek kemasyarakatan yang lingkupnya jauh lebih luas dan kompleks ketimbang fenomena shalat (mengurus) jenazah yang selalu dicontohkan itu. Sasaran utama (hikmah) doktrin *fardhu kifayah* adalah tegaknya kebersamaan seluruh anggota masyarakat dalam suatu kelompok kehidupan yang sejahtera, aman, tertib, adil, makmur, serta terhapusnya semua yang berlawanan dengan itu.

Ali Yafie menyebutkan beberapa contoh kewajiban yang menyangkut hal-hal umum yang berkaitan dengan kemaslahatan baik yang bersifat keagamaan maupun keduniaan yang pelaksanaannya menjamin tegaknya kehidupan bersama, misalnya antara lain: Upaya mengatasi kemelaratan masyarakat, dengan memenuhi kebutuhan sandang pangan yang tak tertanggulangi dengan zakat dan dana *baitul maal*, penyediaan lapangan kerja dengan berbagai macam profesi dan macam-macam industri dan segala sesuatu yang menyangkut kebutuhan hati dan kesempurnaan kehidupan, seperti perdagangan, pertanian dan lain sebagainya sampai pada kebutuhan pemeliharaan kesehatan dan kebersihan, adanya pengawasan umum

dan kontrol sosial dengan pelaksanaan *amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar* secara umum dan meluas sepanjang adanya jaminan keamanan atas diri dan harta benda, atau sepanjang tidak menimbulkan kemaudharratan yang lebih besar, serta pengajaran, pendidikan, penyuluhan dan bimbingan masyarakat. Dan upaya-upaya lain untuk mencerdaskan masyarakat.

Kembali kepada contoh mengurus jenazah, dalam Islam, mengurus jenazah meliputi paling sedikit empat pekerjaan berturut-turut: memandikan, mengkafani, menshalatkan dan mengubur. Semua itu harus diselesaikan dengan segera dan sampai tuntas dan karena itu memerlukan partisipasi banyak orang. Di situ diperlukan tenaga otak dan otot, dari orang yang mampu mengatur dan memimpin tata cara dan upacara, sampai tenaga teknis seperti tukang gotong dan tukang gali kubur. Itu semua agar seluruh pekerjaan berjalan baik, tertib dan memenuhi ketentuan hukum. Barulah kalau semuanya selesai dengan baik, seluruh anggota kelompok terbebas dari dosa. Jadi ukuran utamanya adalah pada sisi "selesai atau tuntasnya pekerjaan", bukan semata-mata pada "ada atau tidaknya orang yang mengerjakan" atau "terwakilinya"¹² kewajiban tersebut.

Dengan kata lain, sekalipun ada yang mengerjakan tetapi kalau pekerjaan itu tidak selesai, seluruh kelompok tetap berdosa. Di sinilah keterlibatan sebanyak mungkin orang, kalau perlu seluruh anggota kelompok, semakin baik karena dengan demikian kemungkinan untuk selesai secara, tuntas dan lebih cepat semakin besar, sehingga kelompok tersebut yakin terbebas dari dosa.

Dengan "tuntasnya pekerjaan" sebagai kriteria, orang yang tidak ikut terlibat harus mempunyai kekhawatiran jangan-jangan kewajiban bersama tersebut tidak terselesaikan dengan tuntas dan baik sehingga seluruh kelompok,

terutama dirinya, akan berdosa. Artinya, setiap orang harus mempunyai obligasi moral untuk ambil bagian, karena dengan mengambil bagian itulah, ia akan tahu persis bahwa kewajiban kolektif tersebut terselesaikan dengan baik dan tuntas. Sebaliknya bagi yang terlibat, ia boleh gembira karena bisa berharap memperoleh pahala, sedikitnya dari dua sisi; (a) mengerjakan' fardhu itu sendiri dan (b) membebaskan orang lain dari dosa. Sisi terakhir inilah, yang tidak diperoleh dari melakukan pekerjaan individu baik *fardhu 'ayn* maupun *sunnah*, sekaligus ini pula kelebihan *fardhu kifayah* dibanding *fardhu 'ayn* dan *sunnah*.

Penjelasan ini tentu berlaku bukan saja pada kasus jenazah tetapi juga pada *fardlu kifayah* lain yang lingkupnya jauh lebih luas, termasuk membangun kehidupan bersama yang sejahtera, menegakkan keamanan, ketertiban, keadilan, kemakmuran, serta menghapuskan segala hal yang berlawanan dengan itu seperti kemelaratan, kebodohan, keterbelakangan, berbagai bentuk kriminalitas dan dekadensi moral termasuk fitnah, kolusi, korupsi dan seterusnya.

Kalau ini benar, maka slogan "kepentingan umum (bersama) harus lebih didahulukan daripada kepentingan pribadi" bukanlah omong kosong, melainkan bagian dari tradisi Islam yang menyeruak melalui doktrin *fardlu kifayah*. Penjabaran secara tuntas syarat, rukun, dan *kayfiyah* (pelaksanaan) seluruh kerja kemasyarakatan yang hokumnya *fardhu kifayah* itu, agar menjadi formulasi rinci dan operasional, perlu seperangkat fiqih sosial yang sebenarnya.

III. KESIMPULAN

Dari berbagai uraian singkat penulis terhadap analisa Ali Yafie tentang Fardhu Kifayah di atas, maka dapat kita ambil sebuah kesimpulan mendasar bahwa Fardhu Kifayah ternyata

tidak sesederhana apa yang kita fahami selama ini. Adalah benar terdapat sejumlah pendapat yang berbeda untuk tidak menyebut bertolak belakang dari analisa di atas bahkan kemudian menjadi doktrin yang sangat populer pada masyarakat, namun ketika kita kembali “berkaca” dan menggunakan akal sehat termasuk sifat kehati-hatian kita dalam beragama, adalah bijak jika masyarakat yang tadinya “memandang enteng” kajian ini kembali intronspeksi terhadap apa yang telah menjadi “kepercayaan mapan” di benak mereka. Tentu tidak terkecuali tema-tema lain yang belum sempat termuat dalam makalah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial*, Bandung: Mizan, 1997
- Bisri Efendi, *Anuqoyah: Gerak Transformasi Sosial Madura*, (Jakarta: PEM, 1985)
- H. S. Agil Husin al-Munawwar, MA. *Teori Ijtihad dalam Hukum Islam*, Cet. I; Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1983
- Hamka Haq. *Falsafat Ushul Fiqhi*. Cet I, Ujung pandang : Al-Ahkam, 1998
- Mahmud Thahhan “*Ma’fhumut-Tajdid Baina Sunnah An-Nabawiyah wal Mujaddinal Muashirin*,” diterjemahkan oleh M. Thalib dengan judul *Pembaruan Pemikiran Islam; Sebuah Tipu Daya Belajar dari Kasus Sudan*, Cet. I; Surabaya: Amarpress, 1987
- Noel James Coulson, *Conflict and Tension in Islamic Jurisprudence*, Chicago & London: The University of Chicago Press, 1969

Jamal D. Rahman (et al), *Wacana Baru Fiqih Sosial, 70 Tahun K.H. Ali Yafie*, Bandung : Mizan, 1997

Yusuf al-Qardawi, *Al-Ijtihad fi al-Syari’ah al-Islamiyah Ma’a Nazharah Tahliliyah fi al-Ijtihad al-Mu’ashir*, terjemahan Ahmad Syathori “Ijtihad dalam Syariat Islam” Jakarta: Bulan Bintang, 1987

Zamaksari Dhofier. *Tradisi Pesantren-pesantren tentang Pandangan Hidup Kyai*, Jakarta: LP3ES, 1982

Catatan Akhir:

¹Penulis adalah Dosen UIN Alauddin Makassar. Kandidat Doktor pada Universitas yang sama dengan konsentrasi Hukum Islam. Mengambil konten analisis: Pemikiran Hukum Islam Transformatif K.H. Ali Yafie; *Sebuah Kontribusi metodologis dalam Pembinaan Hukum Nasional*.

²Noel James Coulson, *Conflict and Tension in Islamic Jurisprudence*, (Chicago & London: The University of Chicago Press, 1969), h. 58-76.

³Bisri Efendi, *Anuqoyah: Gerak Transformasi Sosial Madura*, (Jakarta: PEM, 1985) h. 51

⁴Zamaksari Dhofier. *Tradisi Pesantren-pesantren tentang Pandangan Hidup Kyai*, (Jakarta: LP3ES, 1982), h. 56

⁵Dua Ulama lainnya adalah Syeikh Nawawi al-Bantani (wafat kira-kira tahun 1896) dan Syeikh Ahmad Khatib al-Minangkabawau (1860-1916). Mereka bertiga mendapat kehormatan menjadi guru besar setelah mendalami ilmu agama di Mekkah Arab Saudi. Lihat Jamal D. Rahman (et al), *Wacana Baru Fiqih Sosial, 70 Tahun K.H. Ali Yafie*, (Bandung : Mizan, 1997), h. 20

⁶Muhammad Yafie adalah seorang ayah yang bersahaja, kendati ia berasal dari keluarga yang memiliki status social yang tinggi. Ia seorang guru agama yang berpindah-pindah tempat, baik karena permintaan masyarakat untuk mengajar, membuka madrasah atau karena desakan situasi. Seperti ketika terjadi

perang dunia 11, misalnya beliau terpaksa menyingkir dari Parepare ke Rapang, sebuah kota kecil di pedalaman Sulawesi Selatan, ketika itu situasi kacau, tak menentu, penuh teror dan ancaman, karena Jepang masuk ke Indonesia dan memporak-porandakan Belanda. Dan ketika Perang Asia Timur Raya, rakyat Sulawesi Selatan dan daerah-daerah lain mencapai titik puncak penderitaan. Keluarga Muhammad Yafe sangat sulit memenuhi hajat hidup, bahkan yang paling primer pun. Padi hasil cocok tanam dan bahan pakaian yang ada di pasar dirampas Jepang untuk kepentingan perang. Demikian juga harta yang dimiliki- warisan Syekh Ahmad Hafidz dirampok orang, maka Muhammad Yafe muda pun menjadi sangat sederhana. Meskipun demikian, ia tetap menjalankan tugas sehari-hari dengan baik. Disamping seorang guru agama ia juga selalu mengumpulkan sejumlah santri bersama anak-anaknya untuk dididik, sepanjang hari dengan ikhlas. Ia juga memimpin sebuah sekolah dengan ratusan murid, yang dibiayai oleh seorang *amblenar* bernama Abdurrahim, orang Makasar yang mempunyai perhatian besar terhadap pengembangan pendidikan agama. Kemudian seperti umumnya para ulama, ia juga mendirikan dan mengasuh sebuah pesantren yang bernama *Nashrul Haq*, di Amparita atas bantuan Andi

Sulolipu Raja. Dengan demikian Ali Yafe tidak lain adalah putra dari seorang pimpinan Pondok Pesantren *Nashrul Haq*. *Ibid*, h. 5

⁷*Ibid*, h. 3. Ali Yafe lahir di sebuah desa pantai bernama Wani Donggala, Sulawesi Tengah, 1 September 1926. Namanya disandarkan pada nama ayahnya, KH. Muhamad Yafe. Nama sebenarnya adalah Muhamad Ali. (Lihat Jamal D. Rahman, (ed), 1997, h. 3). Ali Yafe lahir dari keluarga terdidik dan terhormat. Kakeknya Syekh Abul Hafidz Bugis, adalah satu dari tiga ulama terkemuka di Indonesia yang menjadi guru besar pertama di masjidil Haram Makkah, Arab Saudi. (Lihat *ibid*.)

⁸Sofyan A. Kumba dan Muhammadiyah Amin, 2001, h. 12-13

⁹Ali Yafe, *Menggagas Fiqih Sosial*, (Bandung: Mizan, 1997), h. 151. untuk selanjutnya akan disebut Ali Yafe, "Menggagas....".

¹⁰ *Ibid*., h. 161-162

¹¹ *Ibid*.

¹³ *Ibid*., h. 162